

## PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Luthfi Riadi<sup>1\*</sup>, Achmad Febrianto<sup>2</sup>, Saifuddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>STEBI Al-Anwar Bangkalan Madura, Jawa Timur, Indonesia

<sup>2,3</sup>Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

\*[luthfiriadi12@gmail.com](mailto:luthfiriadi12@gmail.com)

DOI: 10.33852/jurnalin.v5i2.322

Received: July 2021

Accepted: December 2021

Published: December 2021

### Abstract :

*This study discusses the economic development of Islamic boarding schools in Probolinggo Regency by empowering coastal Muslim communities by producing marine processed products. Islamic boarding schools have provided a new nuance for coastal communities in the form of economic improvement. The researcher uses a qualitative phenomenological method with data collection techniques, namely observation and interviews and several references obtained from reputable books and journals related to empowerment and economic development. The results showed that; 1) The efforts made by the Nurul Jadid Islamic Boarding School in formulating a pattern of empowering coastal communities are based on two approaches, namely increasing the ability of the community independently and creating opportunities for economic development for the community; 2) Economic development of coastal communities is carried out through strengthening the social structure, economic equity, education on the values of economic independence, community participation, and community involvement in regional development.*

**Key words :** Islamic Boarding Schools, Empowerment, Coastal Areas

### Abstrak :

*Penelitian ini membahas tentang pengembangan ekonomi pondok pesantren di Kabupaten Probolinggo melalui pemberdayaan masyarakat muslim pesisir dengan menghasilkan produk hasil olahan laut, di mana pondok pesantren telah memberikan sebuah nuansa baru bagi masyarakat pesisir dalam bentuk peningkatan ekonomi. Peneliti menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara serta beberapa referensi yang didapatkan dari buku-buku dan jurnal bereputasi yang ada kaitannya dengan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Upaya yang dilakukan pondok pesantren Nurul Jadid dalam merumuskan pola pemberdayaan masyarakat pesisir berprinsip pada dua pendekatan, yaitu peningkatan kemampuan masyarakat secara mandiri dan terciptanya peluang pengembangan ekonomi bagi masyarakat; 2) Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui penguatan tatanan struktur sosial, pemerataan ekonomi, edukasi nilai-nilai kemandirian ekonomi, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan masyarakat pada pembangunan daerah.*

**Kata Kunci :** Pesantren, Pemberdayaan, Pesisir

## PENDAHULUAN

Situasi perekonomian yang tidak kunjung membaik pada masa pandemi membuat kemampuan dan keamanan dalam bekerja menjadi persoalan utama, dari kondisi tersebut banyaknya pusat perekonomian mengalami penurunan pemasukan terutama pada sektor riil. Akibatnya adalah pemberhentian sebagian karyawan yang bersifat sementara maupun permanen, banyaknya orang menganggur menjadikan permasalahan kronis bagi negara ini, ini juga akan bereakibat pada lulusan muda negara ini yang bingung dalam menentukan nasib apalagi dengan tingginya tingkat kelulusan yang semakin bertambah dan ditambah adanya covid 19 yang tidak kian tuntas (Mustajab & Fawa'iedah, 2020; Mundiri & Jannah, 2021), hal tersebut akan menambah daftar pengangguran di negara ini yang diakibatkan oleh sempitnya lapangan pekerjaan (Rahman, 2019; Rahman & Subiyantoro, 2021).

Melalui pengetahuan yang dimiliki oleh para lulusan muda merupakan salah satu instrumen dalam memenuhi kriteria pekerjaan, Pemberdayaan generasi muda adalah solusi yang tepat dimasa ini, hal tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan potensi yang ada dalam pengembangan ekonomi, potensi yang dimiliki lulusan muda adalah potensi yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan memberikan pemahaman potensi ekonomi kreatif, dengan mengaktifkan potensi lokal menjadi hal yang bernilai (Niswa, 2019). Rangsangan peningkatan potensi ekonomi kreatif pada masa pandemi ini juga dilakukan oleh pemuda yang berasal dari pondok pesantren, dimana dalam pandangannya mereka bisa memberikan sebuah pemahaman ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan ilmu agama sehingga pemahaman ekonomi yang berbasis agama bisa menjadi solusi dimasa pandemi, seperti halnya pondok pesantren sebuah lembaga pendidikan yang mampu menggabungkan ilmu agama dengan ilmu sosial, pembelajaran multi interdisipliner yang diterapkan di era moderen mampu mencetak para sarjana yang ahli di beberapa bidang (Yuliani, 2019; Ardillah, 2019).

Seiring dinamika perkembangan zaman, pondok pesantren bukan lagi terfokus sebagai lembaga pendidikan Islam saja akan tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memiliki peran strategis dalam membangun sebuah kemandirian bagi masyarakat, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi yang berbasis kerakyatan. Sering kali masyarakat menyepelekan peran pesantren karena dianggap pesantren hanya mampu melahirkan para pemikir tradisional, religious atau da'i. hari ini peran pondok pesantren telah berkembang secara masif. Hal ini diyakini mampu menjadi solusi dalam mengatasi masalah tersebut, sekaligus menjadi alternatif dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang menggeser sistem ekonomi yang telah berjalan, Indonesia yang kaya akan budaya dan penduduk sangat berpotensi dalam pengembangan ekonomi (Lestari, 2018).

Pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo dengan memberdayakan masyarakat muslim pesisir adalah salah satu langkah yang tepat dalam melakukan pengembangan ekonomi. Masyarakat muslim pesisir dianggap sebagai masyarakat yang sangat

agamis, hal tersebut terpancar dari kegiatan keagamaan yang selalu rutin mereka lakukan, dan adanya peran pondok pesantren yang telah hadir ditengah-tengah mereka untuk mencoba memanfaatkan potensi laut dengan pendekatan sosial dan agama agar potensi laut bisa lebih bernilai. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti etika bisnis dengan pondok pesantren nurul jadid sebagai subjek dalam pemberdayaan ekonomi dan masyarakat pesisir sebagai subjeknya, dalam penelitian ini pisau analisisnya pendekatan sosial dan agama karena dilihat dari pola hidup masyarakat pesisir yang sangat mensakralkan seorang tokoh agama yang berasal dari Pondok Pesantren serta peran Pesantren dalam mengembangkan ekonomi masyarakat muslim pesisir (Marlina, 2014).

Empowerment atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemberdayaan masyarakat yaitu sebuah konsep yang membangun ekonomi berbasis sosial yakni sebuah konsep yang lebih cenderung pada peran manusia dalam berpartisipasi dibidang ekonomi atau disebut juga dengan *people centered participatory*. Pemikiran tentang empowering ini pada hakikatnya lebih luas yaitu pada membangun potensi manusia. Pemikiran ini mencoba untuk mendorong manusia agar tidak terbelenggu pada permainan politik ekonomi dimana kepentingan sektoral yang menjadi permasalahan sehingga tingkat kreatifitas manusia sangatlah terbatas (S. N. Azizah, 2018).

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh IPAD (International Fund for Agriculture Development) menjelaskan bahwasanya peranan dari rakyat golongan menengah kebawah telah memberikan sumbangsih besar bagi pembangunan negara hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan investasi pada sektor-sektor makro, hal tersebut terceminkan pada meningkatkannya pendapatan ekonomi yang berdasarkan pada sektor lokal atau sektor mikro lebih efisien dalam membangun ekonomi bangsa. Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak membutuhkan banyak modal dalam hal tersebut sangat berpengaruh pada negara-negara yang sedang berkembang yang telah mengalami kekurangan devisa dan sangat lemah pada posisi pembayaran. Untuk mengkaji struktur pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi, dapat dikaji dari tiga , dan berikut penjelasannya:

*Pertama*, Faktor *enabling* adalah usaha untuk terciptanya kondisi yang bisa meningkatkan potensi agar masyarakat lebih kreatif dalam menciptakan usaha. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada manusia yang terlahir tanpa memiliki kelebihan. Pemberdayaan yaitu upaya dalam memfasilitasi seseorang agar potensi atau bakat yang terpendam bisa bangkit dan menghasilkan, dengan cara dorongan inovatif serta membangun kreatifitas dibidang ekonomi. *Kedua*, Faktor *empowering* yakni penguatan potensi rakyat dengan cara membangun manusia yang memiliki potensi agar peluang kerja lebih terbuka. Proses ini adalah proses yang paling utama dalam *empowerment* yakni peningkatan standarisasi mutu pendidikan dan kualitas kesehatan dan cakupan dalam pengembangan ekonomi seperti modal penguatan di bidang teknologi dan membangun fasilitas sarana layanan publik agar bisa dijangkau

oleh seluruh elemen masyarakat. Maka dari itu diperlukan perencanaan yang terorganisir secara matang agar cakupan pada peningkatan ekonomi bisa terfasilitasi. *Ketiga*, Faktor *protecting* adalah faktor yang melindungi masyarakat golongan bawah atau masyarakat lemah, yakni dengan peningkatan peran masyarakat dalam berpartisipasi, hal tersebut dilakukan agar masyarakat bisa berperan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (Ryandono, 2018).

Pembangunan masyarakat diartikan sebagai bentuk yang dapat mendorong masyarakat untuk mandiri, oleh karena itu mereka dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi secara bersamaan serta keterbatasan akan kebutuhan hidupnya. pembangunan masyarakat diartikan sebagai kegiatan yang terstruktur dalam menciptakan kemajuan ekonomi serta kemajuan dibidang sosial (Fathoni & Rohim, 2019).

Sektor sosial adalah salah satu point terpenting dalam membangun ekonomi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan, sektor ini harus didukung oleh beberapa organisasi yang handal dalam bidang peningkatan ekonomi agar menumbuhkan etos kerja yang baik dalam mencapai kesejahteraan. Pembangunan masyarakat (pedesaan) pada masa yang lalu mendasarkan pada azas pemerataan yang penerapannya diarahkan secara sektoral dan pada setiap desa. Pemerataan pembangunan pada masa lalu telah dicoba oleh pemerintah dengan tujuan agar pembangunan lebih merata meskipun anggaran yang tersedia sangatlah besar akan tetapi dengan luas daerah dan banyaknya desa sehingga kesediaan dana yang besar tersebut harus dibagi rata sehingga setiap desa mendapatkan dana yang relatif sangat minim, sehingga pemerataan pembangunan sulit untuk terwujud (Karnawijaya & Aini, 2020).

Paradigma dalam pemerataan pembangunan adalah langkah yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan, akan tetapi dalam membangun perlu memperhatikan rambu-rambu agar pembangunan yang ada tidak merusak tatakelolah yang ada didesa terutama pada daerah pesisir. Dalam meningkatkan pembangunan di daerah pesisir harus sesuai dengan tatakelolah yang ada agar nantinya bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mendasar dari mereka dalam berpartisipasi untuk meningkatkan produktifitasnya, dan berikut beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat pesisir; *Pertama*, bagaimana strategi dalam memotivasi masyarakat pesisir dalam meningkatkan produktifitas bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. *Kedua*, Bagaimana cara agar terciptanya aktifitas perekonomian yang melibatkan banyak sektor di daerah pesisir. *Ketiga*, bagaimana cara dalam merancang program secara sistematis agar bisa dijadikan patokan oleh masyarakat pesisir. *Keempat*, bagaimana langkah dalam mengintrograsikan kebiasaan yang sudah membudaya dengan perencanaan matang dalam membangun perekonomian (Syamsuri, 2020).

Masalah yang seringkali digaungkan oleh pemerintah setiap tahunnya adalah cara dalam membangun masyarakat, akan tetapi terdapan inkonsiten pada cara dalam membangun ekonomi pedesaan terutama daerah pesisir

sehingga masyarakat selalu dilema dengan kebijakan tersebut. Dengan kondisi hari ini dimana telah terjadi pergeseran opini terkait peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, peran pemerintah bukan lagi sebagai provider akan tetapi lebih pada enabler. Pemerintah berperan sebagai enabler artinya pembangunan masyarakat dalam meningkatkan kelayakan ekonomi berdasarkan kemampuan masyarakat secara mandiri bukan semata-mata pemerintah sebagai subjek utama dan lembaga pemerintah hanya sebagai fasilitas dalam pengembangan tersebut (Effendy & Anisyah, 2019).

Dalam pidatonya Dirjen Bangde menjelaskan bahwa sebenarnya pembangunan masyarakat pesisir adalah suatu proses yang tidak bisa utuh, artinya kebijakannya harus menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi agar nantinya bisa berkelanjutan, hal tersebut mencerminkan ide yang ideal untuk dikembangkan secara terus menerus, oleh karenanya dalam mengatur strategi yang bersifat dinamis perlu merancang manajemen resiko agar masyarakat tidak tersesat pada rancangan pembangunan regional ataupun pada pembangunan nasional. Dari penjelasan tersebut telah menekankan pada inisiatif masyarakat lebih penting dari pada peran pemerintah (Bustomi & Umam, 2017).

Keikutsertaan masyarakat adalah modal awal dari pembangunan masyarakat pesisir, dengan berpartisipasi mereka, konsep pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan bisa berjalan, karena inti dari pembangunan ekonomi adalah pemberdayaan masyarakat agar mandiri dalam pengembangan ekonomi sehingga pembangunan ekonomi tidak lagi berpusat pada persoalan birokrasi saja akan tetapi lebih pada pengembangan masyarakat yang berbasis kemandirian lokal. Menurut para pakar prinsip dalam membangun masyarakat sebagai berikut; *Pertama*, keterbukaan dalam segala hal baik anggaran dan kebijakan yang berlaku. *Kedua*, keterlibatan rakyat dalam mengembangkan usaha. *Ketiga*, hasil dapat diperoleh oleh masyarakat. *Keempat*, bisa dipertanggung jawabkan. *Kelima*, terus menerus dalam pengembangan usaha dan mengikuti pola perkembangan zaman (NS, 2017).

Gagasan dalam pembangunan ekonomi lebih berorientasi pada model pembangunan yang lebih mementingkan peran masyarakat ketimbang peran dari kalangan birokrasi, gagasan tersebut bisa dibidang sebagai alternatif dalam pengembangan ekonomi yang bersifat berkelanjutan. Alternatif ini bisa dikembangkan hingga ke pelosok masyarakat dengan mengangkat kearifan lokal yang menjadi ujung tombak dari gagasan pengembangan masyarakat. Pada dasarnya pembangunan ini lebih terfokuskan pada peran masyarakat oleh karenanya perlu adanya penyelarasan pemikiran antara pihak pemerintah dengan elemen masyarakat yang bertujuan membangun perokonomian dengan mengangkat kearifan lokal dengan cara memberdayakan masyarakat.

Terkait ekonomi kreatif yang mana merupakan bentuk baru setelah ekonomi pertanian, ekonomi kelautan, ekonomi industri dan ekonomi informasi yang memberdayakan informasi sesuai namanya juga kreatifitas, hal ini telah dipaparkan dalam blueprint pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia tahun 2012-2018. "Ekonomi kreatif" mengawali produksi utama

dalam kegiatan ekonomi dengan memunculkan berbagai ide dan pengetahuan dari sumberdaya manusia (Sulaiman et al., 2016).

Pondok Pesantren juga sebagai pelaku dalam pengembangan ekonomi kreatif, hal ini menegaskan bahwasanya Pondok Pesantren tak hanya bergerak di bidang pendidikan keagamaan saja. Beberapa Pondok Pesantren di Jawa Timur telah mulai menerapkan konsep ekonomi kreatif ini, dimana sistemnya menggunakan perpaduan antara ekonomi berbasis syariah dan pengembangan masyarakat. Tentunya system ini juga telah digunakan oleh beberapa pesantren di daerah lain. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya Pondok Pesantren juga berpotensi menggerakkan perekonomian di bidang syari'ah, ada tiga: Pertama ialah sebagai agen perubahan sosial dibidang ekonomi Syari'ah. Di tengah arus globalisasi di seluruh dimensi kehidupan manusia, himpitan dan tekanan ekonomi menjadi salah satu akar penyebab terjadinya disorientasi manusia muslim. Lingkungan yang kian kapitalistik, materialistik dan hedonis seolah memberikan legimitasi untuk bersikap permisif terhadap segala sesuatu meskipun mendistorsi ajaran agama. Pranata sosial seolah tercabut oleh kepentingan-kepentingan ekonomi jangka pendek.

Kondisi inilah yang menyebabkan manusia merasa "lelah" dan tertekan dalam mengembangkan potensi ekonominya. Orientasi aktifitas ekonomi yang mulai bergeser berubah makna, yang mulanya bertujuan memenuhi hajat hidup saja menjadi aktifitas memuaskan selera dan keinginannya (Satisfying wants). Karena hal yang berlandaskan pada nafsu dan keinginan tak pernah mengenal batas, maka sejatinya manusia terus mengejar tanpa henti. Begitulah akhirnya manusia memasuki fase lelah (Muslimin, 2019).

Pesantren berperan penting dalam merubah orientasi ekonomi masyarakat pesisir yang mulanya memiliki tujuan *satisfying wants*, menjadi konsep "cukup" dengan beberapa pemberdayaan. Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa pesantren memiliki peran dalam perubahan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Menggiring aktifitas ekonomi yang mulanya bersifat konsumeris, menjadi pola hidup moderat. Tujuannya adalah untuk mengubah orientasi profit-oriented dan utility menjadi orientasi *maximizing maslahah*.

Point kedua yaitu peran pesantren sebagai tempat untuk pengembangan keilmuan dan sosial dimana pembelajaran terfokuskan pada edukasi pengenalan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Karena lembaga pendidikan pesantren dianggap sebagai lembaga pengkaderan ummat yang bisa memberikan solusi bagi masyarakat luas. Lulusan pondok pesantren dianggap sebagai lulusan yang mampu memecahkan beberapa permasalahan didunia ekonomi hal ini tercerminkan dari banyaknya alumni Pesantren yang menjadi Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syari'ah dengan peranan sebagai pengawas dalam menjalankan aktifitas transaksi yang berdasarkan pada hukum Islam agar transaksi yang mereka lakukan sesuai dan terhindar dari riba. Selain itu peran mereka dimasyarakat sebagai penuntun umat, karena tradisi yang terjadi dimasyarakat lulusan Pesantren memiliki nilai lebih dalam penguasaan agama seperti halnya pada penguasaan di bidang fiqih, akhlaq dan tasawuf (Achmad, 2012).

Point terakhir adalah dengan mewujudkan peranan penting dalam kehidupan atau karena dunia luar sebagai representatif dari laboratorium bagi mereka. Santri dalam hal ini memiliki peranan yang sangat strategis, karena pandangan masyarakat pesantren dianggap sebagai lembaga yang memberikan tauladan baik bagi kehidupan sehari-hari. Pesantren yang telah dianggap sebagai lembaga yang memberikan contoh baik maka perlu juga pesantren menerapkan atau mengedukasi masyarakat akan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang nantinya akan ada migrasi besar-besaran dari sistem ekonomi konvensional menuju paham ekonomi syariah yang bebas dari praktek-praktek kotor seperti riba, maisyir dan gharar. Dan sebaliknya ketika pesantren tidak aktif dalam menyuarakan dakwah dalam pemahaman muamalah maka yang terjadi adalah maraknya praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum Islam (Azizah, 2017).

Di sisi lain, pesantren tertuntut untuk mandiri dari segi ekonomi finansial. Secara financial, dependensi pesantren kepada pihak luar menjadikan pesantren lebih mudah dimasuki oleh kepentingan tertentu. Pesantren menjadi tidak merdeka dalam melangkah menentukan keputusan intern dan eksternal pesantren baik dari segi birokrasi, kekuatan politik, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sehingga penting bagi pesantren memiliki unit-unit usaha dan bisnis yang bersifat profit oriented namun tetap berpegang pada konsep halal syariah. Terdapat istilah unik di kalangan pebisnis syariah, MAGHRIB (*maysir, gharar, riba, risywah* dan *batil*) sebagai acuan bagi kaum muslimin dalam memfilter sebuah usaha dari hal dan barang bathil (Lugina, 2017).

Selanjutnya, peran pesantren yang lain adalah sebagai lembaga produksi dan konsumsi. Istilah lembaga produksi merupakan singkat kata dari kuasa kepemilikan pesantren atas lahan luas. Lahan luas inilah yang menjadi pusat produksi, dimana berdiri pusat-pusat pembelajaran bagi para pencari ilmu, secara tidak langsung mengangkat sumber pendapatan ekonomi pada suatu daerah (konsumsi). Terlebih jika Pesantren bergerak di bidang tertentu, semisal kelautan, maka dapat dikatakan pesantren tersebut adalah produsen dalam bidang kelautan. Optimalisasi pesantren dalam pendidikan bidang ekonomi syariah merupakan hal yang ditunggu-tunggu. Untuk bisa eksis dan memiliki kekuatan adaptif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sebuah pesantren harus mengembangkan system pendidikannya, termasuk di dalamnya muatan kurikulum yang diterapkan, metodologi pembelajaran, salah satunya juga dengan mengakomodir muatan Fiqh Muamalah Syariah baik teori maupun praktik (Supeno, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam kajian ini peneliti akan mengulas etika sosial ekonomi dengan mencoba memperdalam kajian tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh pondok pesantren kepada masyarakat muslim pesisir. Dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara serta beberapa referensi yang didapatkan dari buku-buku dan jurnal bereputasi yang ada kaitanya dengan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Model Pemberdayaan Pondok Pesantren**

Upaya yang dilakukan oleh pondok pesantren Nurul Jadid dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan atau pemberdayaan masyarakat adalah langkah yang tepat untuk membudayakan jiwa kewirausahaan, salah satunya adalah proses inkubasi yang tidak berjalan dengan baik. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dapat berjalan dengan baik, namun dari hasil pendidikan dan pelatihan tersebut tidak memberikan jaminan adanya keberlanjutan usaha setelah mereka lulus dari pendidikan pondok pesantren, adanya beberapa kendala yang mereka hadapi salah satunya adalah kendala permodalan dimana keterampilan yang mereka miliki tidak bisa dikembangkan.

Sebenarnya permasalahan permodalan yang menjadi kendala utama santri dalam mengembangkan potensinya, pada hakikatnya hal tersebut bisa terselesaikan dengan cara melakukan pendekatan secara masif kepada masyarakat dengan mencoba untuk meningkatkan ekonomi dengan cara pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan potensi lokal. Gagasan ide tersebut telah dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid dimana pesantren memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, oleh karenanya pendekatan pesantren dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara pendekatan tokoh Agama serta beberapa pihak yang berperan didalamnya seperti, pengasuh pesantren, santri, alumni, masyarakat serta peranan pemerintah dalam legalisasi. Peranan dari beberapa sektor merupakan sebuah proses yang mengintegrasikan nilai-nilai agama pada peningkatan ekonomi lintas sektoral.

Dalam upaya yang dilakukan pondok pesantren Nurul Jadid dalam merumuskan Perumusan pola pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah berprinsip pada dua pendekatan, yang pertama adalah pendekatan dalam peningkatan kemampuan masyarakat secara mandiri dan terciptanya peluang pengembangan ekonomi bagi masyarakat. Dalam upaya yang dilakukan ini berdasarkan pada kemampuan masyarakat dalam mengembangkan ekonominya terutama bagi masyarakat pesisir yang telah memiliki potensi alam yang melimpah sehingga tujuan dari pondok pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir bisa tercapai. Pemberdayaan ini disebut dengan model pemberdayaan kelembagaan dimana pondok pesantren sebagai penggerak utama dalam mengembangkan potensi masyarakat sehingga peran dari Pemberdayaan kelembagaan mendorong dalam perubahan pada sektor tradisional dimana sebuah tradisi yang mengikat bisa digali potensinya menjadi potensi yang bermanfaat dan juga adanya peranan komunitas masyarakat pesisir dalam pengembangan potensi alam serta adanya pemahaman pasar dalam memasarkan produk olahan laut.

### **Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim Pesisir**

Masyarakat muslim pesisir termasuk pada kelompok masyarakat dengan etos kerja yang sangat tinggi pada bidang ekonomi, hal tersebut terbukti dengan integritas yang cukup tinggi dalam bekerja siang dan malam. Dengan semangat juang yang tinggi dibidang ekonomi masyarakat pesisir

tidak pernah meninggalkan kewajiban mereka dibidang agama. Dari penelitian ini masyarakat pesisir bisa dikatakan pada golongan masyarakat yang agamis karena kegiatan keagamaan yang mereka lakukan tidak pernah putus seperti halnya ketika malam jumat mereka tidak melaut hal ini dipercayai bahwasanya malam jumat adalah malam yang membawa keberkahan, sehingga pada malam tersebut masyarakat pesisir melakukan ritual-ritual keagamaan yang membuat mereka menghentikan aktifitas melaut. Kepedulian tinggi dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir, ini terbukti dengan adanya dorongan pada para remaja untuk mengenyam pendidikan agama serta Al-quran.

Melalui kepedulian masyarakat pesisir akan pentingnya Agama membuat Pondok Pesantren Nurul Jadid yang bertempat di kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tertarik untuk mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir dengan pendekatan agama, karena mayoritas masyarakat pesisir sangat mensakralkan sosok tokoh masyarakat seperti kyai dan para habaib. Kesempatan ini dicoba dalam mengembangkan perkonomian masyarakat pesisir, karena masyarakat pesisir didaerah Kecamatan Paiton memiliki potensi yang cukup kuat dalam pengembangan ekonomi untuk lebih baik oleh karena itu Pondok Pesantren Nurul Jadid mencoba untuk memberdayakan masyarakat muslim pesisir agar hasil sumberdaya laut bisa menjadi bahan olahan yang lebih bermanfaat, karena banyaknya kasus yang beredar masyarakat pesisir di Kecamatan Paiton terbelenggu oleh sistem yang sudah membudaya yakni adanya campur tangan dari pihak tengkulak sehingga untuk mengembangkan kreatifitas dalam bentuk olahan hasil laut sangatlah susah.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren Nurul Jadid yaitu mengembangkan potensi, memberdayakan masyarakat dan memotivasi agar mandiri dalam bidang usaha serta pemahaman marketing dalam pemasaran produk hasil olahan laut. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pondok pesantren Nurul Jadid kepada masyarakat muslim pesisir diharapkan mampu untuk mengelolah sumberdaya laut secara maksimal, hal tersebut agar program pemberdayaan ini bisa berkelanjutan sampai anak cucu mereka. Maka dengan adanya program yang berkelanjutan kemandirian ekonomi masyarakat muslim pesisir akan terjamin dan bisa dikembangkan sesuai dengan permintaan pasar.

Akan tetapi perlu juga perlu melihat kapasitas alam yang ada sehingga dalam mengembangkan ekonomi masyarakat muslim pesisir di Kecamatan Paiton juga harus menjaga kelestarian alam karena konsep utama dalam Islam adalah masalah yang mana pemanfaatan sumberdaya bukan semata-mata sebagai tujuan dalam mencapai kepuasan tetapi kesejahteraan bersama dengan menjaga kondisi alam adalah tujuan dari pengajaran aktualissa Islam sebagai agama yang dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir Pondok Pesantren Nurul Jadid menjelaskan beberapa upaya yang dilakukan, dan berikut penjelasannya:

*Pertama*, Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Paiton bisa dilihat dari tatanan struktur sosial mereka sehingga upaya yang dilakukan oleh Pondok Nurul Jadid dalam dengan mengkombinasikan peranan struktur sosial

yang agamis dengan peran pesantren dalam dunia dakwah. *Kedua*, Upaya dalam pemberdayaan adalah suatu proses dalam pemerataan ekonomi dimana proses ini memberikan peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk mengembangkan ekonominya. *Ketiga*, Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid sebagai bentuk edukasi yang bertujuan agar masyarakat lebih mandiri dalam menjalankan roda perokonomian dan tidak bergantung pada lembaga manapun. *Keempat*, Adanya kolaborasi antara pondok pesantren dan seluruh masyarakat sehingga dalam mencapai kesuksesan diperlukan partisipasi yang kuat dari kedua belah pihak. *Kelima*, Upaya yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat pada pembangunan daerah dimana peran masyarakat sangat vital sehingga perlu adanya upaya dan dorongan agar pembangunan daerah melibatkan potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat.

## KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan Pondok Pesantren Nurul Jadid dalam merumuskan Perumusan pola pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah berprinsip pada dua pendekatan, yang pertama adalah pendekatan dalam peningkatan kemampuan masyarakat secara mandiri dan terciptanya peluang pengembangan ekonomi bagi masyarakat. Pemberdayaan ini disebut dengan model pemberdayaan kelembagaan dimana Pondok Pesantren sebagai penggerak utama dalam mengembangkan potensi masyarakat sehingga peran dari Pemberdayaan kelembagaan mendorong dalam perubahan pada sektor tradisional dimana sebuah tradisi yang mengikat bisa digali potensinya menjadi potensi yang bermanfaat dan juga adanya peranan komunitas masyarakat pesisir dalam pengembangan potensi alam serta adanya pemahaman pasar dalam memasarkan produk olahan laut dalam mengembangkan ekonomi masyarakat pesisir Pondok Pesantren Nurul Jadid menjelaskan beberapa upaya yang dilakukan seperti melihat tatanan struktur sosial, pemerataan ekonomi, edukasi nilai-nilai kemandirian ekonomi, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan masyarakat pada pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. (2012). *Bentuk-bentuk pengembangan ekonomi masyarakat di pesantren (Studi Kasus atas Pengembangan Ekonomi Masyarakat di PP Annuqoyah Guluk-Guluk Sumenep Madura)*.
- Ardillah, R. (2019). Virtual Account Santri: Ikhtiyar Pesantren dalam Memberikan Layanan Prima Berorientasi Customer Satisfaction. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 1-20.
- Azizah, F. N. (2017). *Pembangunan Masyarakat Berbasis Pengembangan Ekonomi Pesantren Rubat Mbalong Ell Firdaus Tambaksari Kedungrejo Cilacap Jawa Tengah*.

- Azizah, S. N. (2018). Model pengembangan ekonomi pesantren berbasis kearifan lokal: studi kasus Ponpes Sidogiri. *Conference on Islamic Management Accounting and Economic*, 1, 68–76.
- Bustomi, I., & Umam, K. (2017). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Santri dan Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren Wirausaha Lantabur Kota Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 1–10.
- Effendy, M. H., & Anisyah, S. (2019). Manajemen Pengembangan Ekonomi Kreatif Santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuwayu Pamoroh Kadur Pamekasan. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 81. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v14i1.2432>
- Fathoni, M. A., & Rohim, A. N. (2019). Pesantren Value Added Sebagai Modal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Cibadak Lebak Banten. *Islamic Economics Journal*, 5(2), 221–232.
- Karnawijaya, N., & Aini, S. (2020). Pemberdayaan Santri Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif “Kimi Bag” Di Pondok Pesantren Al Qohar Klaten. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 20(1), 23. <https://doi.org/10.21580/dms.2020.201.5124>
- Lestari, R. S. (2018). Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi Mandiri Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Darrun Nasyi’in Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur).
- Lugina, U. (2017). Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(1), 53–64.
- Marlina. (2014). Potensi Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 117–134.
- Mundiri, A., & Jannah, F. (2021). Quality Assurance of Education in Senior High School during Covid-19 Pandemic. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2203–2212.
- Muslimin. (2019). Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Gerakan Wirausaha (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto Jawa Timur).
- Mustajab, M., & Fawa’iedah, Z. (2020). Adapting to Teaching and Learning During Covid-19: A Case of Islamic School’s Initiative of Self-regulated Learning. *Nadwa*, 14(2), 241–264.
- Niswa, H. (2019). Syariah Branding; Komodifikasi Agama Dalam Bisnis Waralaba di Era Revolusi Industri 4.0. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 75–98.
- NS, S. (2017). Model Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, Vol. 6. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v6i3.125>
- Rahman, A., & Subiyantoro, S. (2021). The Leadership Role of School Principals in Online Learning During the Covid-19 Pandemic. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 165–175. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v5i1.1805>
- Rahman, K. (2019). Analisis Peran Program Kemandirian Ekonomi Pesantren Bank Indonesia Dalam Mengembangkan Unit Usaha Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan).

- Ryandono, M. N. H. (2018). Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Jawa Timur pada Abad ke-20. *Mozaik Humaniora*, 18(2), 189–204.
- Sulaiman, A. I., Masrukin, M., Chusmeru, C., & Pangestuti, S. (2016). Pemberdayaan Koperasi Pondok Pesantren sebagai Pendidikan Sosial dan Ekonomi Santri. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 109. <https://doi.org/10.21831/jppm.v3i2.11303>
- Supeno, E. I. (2019). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dan Penguatan Daya Saing Industri Halal Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 1–19.
- Syamsuri. (2020). Strategi Pengembangan Ekonomi Berdikari di Pesantren Gontor Berbasis Pengelolaan Kopontren. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 37. <https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2803>
- Yuliani, Y. (2019). Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Unit Usaha Pondok Pesantren Darussalam Sindangsari Kebersamanah Garut Jawa Barat.